

## Analisis pengaruh IPM dan TPT terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019-2024: Perspektif ekonomi syariah

Adi Basuki Choirul<sup>1)\*</sup>, Dimas Wahyu Rozaki<sup>2)</sup>, Kholid Albar<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Sunan Gresik, Indonesia

Email: [<sup>1\)\\*</sup>ab.choirul@lecturer.usq.ac.id](mailto:ab.choirul@lecturer.usq.ac.id), [<sup>2\)</sup>dw.rozaki@lecturer.usq.ac.id](mailto:dw.rozaki@lecturer.usq.ac.id),  
[<sup>3\)</sup>k.albar@lecturer.usq.ac.id](mailto:k.albar@lecturer.usq.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini terdapat tujuan untuk menganalisa pengaruh IPM dan TPT terhadap PE di 33 provinsi Indonesia selama kurun waktu 2019–2024 dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini disusun menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data panel dan data sekunder yang didapatkan dari BPS. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda untuk mengetahui arah dan besar pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pada tahun 2019 IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE, sedangkan TPT tidak berpengaruh signifikan. Namun, pada periode 2020–2024, IPM dan TPT secara umum tidak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa variasi PE lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti investasi, inflasi, belanja pemerintah, ekspor, dan konsumsi rumah tangga. Dalam perspektif ekonomi syariah, hasil ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari meningkatnya output, tetapi juga dari kemampuan mewujudkan masalah, keadilan distributif, dan kesejahteraan umat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang mampu menaikkan mutu SDM dan memperluas lapangan kerja produktif secara adil juga berkelanjutan.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah, IPM, pertumbuhan ekonomi, TPT.

### Abstract

*This study aims to analyze the effect of the Human Development Index (HDI) and the Open Unemployment Rate (OUR) on economic growth in 33 provinces in Indonesia during the 2019–2024 period from an Islamic economics perspective. This research uses a quantitative method with a panel data approach and secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS). The analysis was conducted using multiple linear regression to determine the direction and magnitude of the effects of the independent variables on economic growth. The results show that in 2019, HDI had a positive and significant effect on economic growth, while OUR had no significant effect. However, during the 2020–2024 period, HDI and OUR generally did not have significant effects either partially or simultaneously. The relatively low coefficient of determination indicates that variations in economic growth were more strongly influenced by other factors outside the model, such as investment, inflation, government expenditure, exports, and household consumption. From an Islamic economics perspective, these findings emphasize that economic growth should not only be measured by output increases, but also by its ability to achieve masalah, distributive justice, and public welfare. This study recommends policies that improve human resource quality and expand productive employment opportunities in a fair and sustainable manner.*

**Keywords:** Economic growth, Human Development Index, Islamic economics, Open Unemployment Rate.

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor penting guna mengukur suksesnya pembangunan suatu kenegaraan (Nasution, Nasution, Agustina, & Tambunan, 2023). Dalam perspektif pembangunan modern, pertumbuhan ekonomi bukan lagi ditelaah hanya sebagai peningkatan *output* nasional, akan tetapi juga merupakan hasil dari mutu SDM, efisiensi pasar tenaga kerja, serta kemampuan negara dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Perspektif ekonomi Syariah memandang pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari proses pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Yunianto, 2021).

Salah satu indikator yang berperan penting dalam mendorong PE adalah mutu SDM (Syahputra, 2017). Dalam teori pertumbuhan endogen, manusia dipandang sebagai modal utama untuk menaikkan produktivitas, mendorong inovasi serta memperkuat persaingan ekonomi (Muttaqin, 2011). Kualitas manusia tersebut umumnya direpresentasikan dengan IPM yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan standar kualitas hidup (Nurlina, Ridha, & Asnidar, 2023; Rosyid et al., 2025). Ekonomi Syariah mempunyai perspektif bahwa peningkatan kualitas manusia juga harus sejalan dengan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al- 'aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan layak merupakan fondasi bagi kehidupan yang produktif dan bermartabat (Amsari, Harahap, & Nawawi, 2024). Semakin tinggi nilai IPM maka semakin besar pula kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara produktif kedalam aktivitas ekonomi (Hanifah & Rachmawati, 2023). Dengan demikian, peningkatan IPM secara teoritis akan memperbesar potensi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang sekaligus mendukung tujuan pembangunan yang berkeadilan menurut prinsip Islam (Arsyad, 2019; Ihsan, Aryandhes, Parlindungan, Mahipal, & Abid, 2025).

IPM adalah tolak ukur untuk menggambarkan tingkat hidup masyarakat melalui bidang kesehatan, pendidikan, dan kualitas tingkat hidup. Data BPS 2024 menggambarkan bahwasannya selama kurun waktu 2019–2024 IPM di provinsi se-Indonesia mengalami kenaikan yang relatif sama. Pada tahun 2019, DKI Jakarta tercatat menorehkan IPM tertinggi senilai 80,76 dan meningkat menjadi 83,08 pada tahun 2024. Sementara itu, Jawa Timur terdapat kenaikan nilai yang awalnya pada tahun 2019 sebesar 71,50, pada tahun 2024 meningkat di angka 74,09. Bahkan Papua yang pada tahun 2019 memiliki IPM sebesar 60,84, pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 73,00. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas IPM di 33 provinsi Indonesia terus mengalami perbaikan selama periode pengamatan.

Disisi lain, kondisi ketenagakerjaan yang tercermin melalui TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) menunjukkan perubahan yang begitu fluktuatif. TPT umumnya mengalami peningkatan Pada tahun 2020 hampir di seluruh provinsi akibat pandemi COVID-19. Sebagai contoh, TPT DKI Jakarta tahun 2019 meningkat dari 6,54%, pada tahun 2020 naik di angka 10,95%, sama halnya di Jawa Barat dari 8,04% meningkat di angka 10,46%, dan Bali yang sebelumnya hanya 1,57% melonjak menjadi 5,63%. Setelah memasuki masa pemulihan ekonomi, TPT kembali menurun. Pada tahun 2024 TPT Bali turun menjadi 1,79%, Jawa Timur menjadi 4,19%, dan Jawa Tengah menjadi 4,78%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pandemi memberikan tekanan besar terhadap pasar kerja, namun pemulihan ekonomi secara bertahap mampu memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di berbagai daerah. Dalam perspektif ekonomi syariah, tingginya pengangguran tidaklah persoalan ekonomi saja, namun persoalan sosial juga mempengaruhi tinggi rendahnya pengangguran karena berkaitan dengan hilangnya kesempatan seseorang untuk memperoleh penghidupan yang layak (Ma'wa & Cahyadi, 2023). Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja produktif menjadi bagian penting dari tanggung jawab pembangunan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan pola yang menarik. Sebelum pandemi, sebagian besar provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada kisaran 4–6 persen. Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bali mengalami kontraksi terdalam sebesar -9,34%, Kepulauan Riau sebesar -3,80%, Banten sebesar -3,39%, dan DKI Jakarta sebesar -2,39%. Setelah pandemi mereda, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Bahkan beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, seperti Maluku Utara yang mencapai 22,94% pada tahun 2022 dan Papua Barat sebesar 20,80% pada tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik dan kemampuan pemulihan ekonomi antarprovinsi di Indonesia.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan IPM melalui kenaikan kualitas tenaga kerja, produktivitas, dan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi teknologi. SDM yang lebih sehat dan berpendidikan bisa melahirkan output yang lebih tinggi oleh karena itu mampu meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Sebaliknya, tingginya TPT menggambarkan beberapa angkatan kerja belum terserap secara produktif sehingga berpotensi menurunkan pendapatan masyarakat, melemahkan konsumsi rumah tangga, dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Hanifah & Rachmawati, 2023; Nurlina et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi manusia sebagai amanah Allah untuk dikelola secara produktif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diduga merupakan pengaruh positif dari IPM, sementara TPT diperkirakan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (A. Putri & Sari, 2024).

Fenomena empiris pada data provinsi di Indonesia menunjukkan hubungan yang tidak selalu searah. Beberapa daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia yang tergolong tinggi belum tentu mempunyai pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain (Rosyid et al., 2025). Sebaliknya, terdapat daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi namun masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan manusia dan ketenagakerjaan. Perbedaan karakteristik ekonomi, struktur industri, investasi, serta kebijakan pembangunan antarprovinsi menyebabkan hubungan antara IPM, TPT, dan pertumbuhan ekonomi menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kondisi ini ditegaskan oleh perspektif ekonomi syariah bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilihat secara menyeluruh, bukan sekedar dari segi output, melainkan sisi keadilan sosial serta kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat (Shobri, Hasibuan, Nasution, & Nasution, 2022).

Dalam perspektif ekonomi syariah, hubungan antara pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui kerangka pembangunan berbasis manusia (*human-centered development*) yang berlandaskan *maqashid syariah*. Sedangkan pada perspektif perekonomian konvensional yang lebih menempatkan laju perekonomian sebagai tujuan utama pembangunan, ekonomi syariah memandang pertumbuhan ekonomi sebagai konsekuensi dari optimalisasi kualitas manusia dan pemanfaatan sumber daya secara produktif. Manusia dijadikan sebagai *khaalifah fil ardh* yang mempunyai mandat guna mengelola sumber daya secara efektif guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama (Septya Margareta, Puji Astuti, & Muamad Ali, 2025). Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan serta kesehatan yang tergambarkan pada IPM merupakan bentuk investasi bekal manusia yang bukan sekedar meningkatkan kinerja dalam berekonomi, juga melainkan untuk mendukung terwujudnya tujuan syariah dalam *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Pada saat yang sama, tingginya TPT menunjukkan pemanfaatan SDM yang belum maksimal sehingga berpotensi mengurangi produktivitas ekonomi dan menghambat distribusi kesejahteraan dalam masyarakat.

Ekonomi syariah menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus bertumpu pada sektor riil yang mampu menciptakan nilai tambah, kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Dalam

pandangan Ibn Khaldun, kemajuan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh kualitas manusianya, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung aktivitas usaha. Oleh karena itu, peningkatan IPM dan penurunan TPT bukan sekedar dinilai untuk tolak ukur suksesnya pembangunan sosial, melainkan sebagai prasyarat penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan bahwa korelasi diantara Indeks Pembangunan Manusia, TPT, dan laju perekonomian dalam perspektif ekonomi syariah tidak semata-mata bersifat statistik, melainkan mencerminkan proses pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas manusia, pemanfaatan tenaga kerja secara produktif, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (falah).

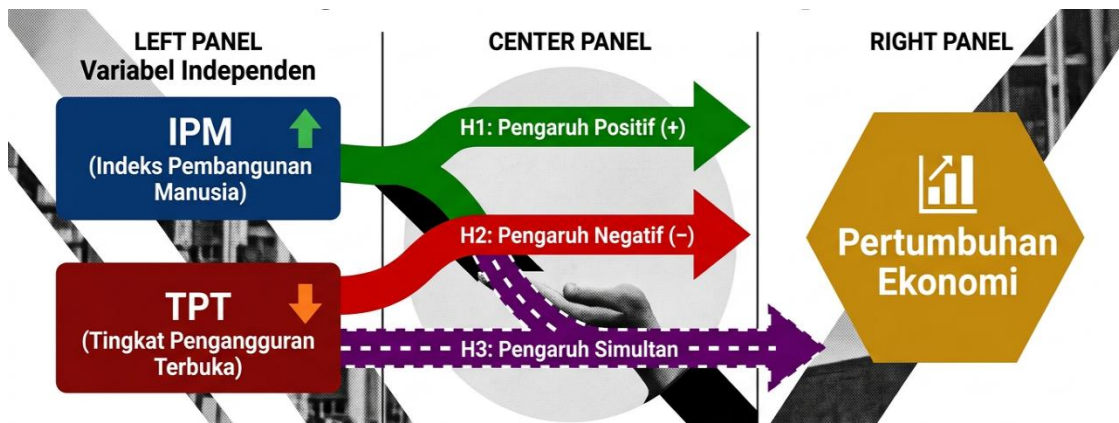
Selain itu, hasil riset sebelumnya mengindikasikan kebaharuan yang belum konsisten tentang pengaruh IPM dan TPT terhadap laju perekonomian. Penelitian Vista (2023) mengungkapkan bahwasannya IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada laju perekonomian, akan tetapi penelitian Safinatun Najah (2017) mengungkapkan bahwasannya memiliki pengaruh yang tidak begitu signifikan. Pada variabel TPT, Purwanti (2021) menemukan terdapat pengaruh negatif terhadap laju perekonomian sesuai pada teori Okun, namun riset dari Melisyah (2025) menunjukkan bahwa pengaruh TPT cenderung lemah bahkan tidak signifikan. Indikasi bahwa hubungan antara IPM, TPT, dan laju perekonomian masih belum menunjukkan kesimpulan empiris yang konsisten dikarenakan terjadi adanya perbedaan hasil, terutama ketika diterapkan pada wilayah, periode waktu, dan karakteristik ekonomi yang berbeda.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu diduga dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya. Sebagian penelitian masih menggunakan cakupan wilayah yang terbatas pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi tertentu, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi Indonesia secara lebih luas. Disamping itu, beberapa riset menerapkan kurun waktu pengamatan yang relatif pendek dan belum mencakup perubahan ekonomi yang signifikan karena adanya wabah COVID-19 serta fase pemulihan perekonomian setelahnya. Di sisi lain, mayoritas penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengujian hubungan statistik antarvariabel tanpa mengaitkannya dengan kerangka pembangunan dalam perspektif ekonomi syariah. Padahal, pembangunan manusia dan ketenagakerjaan bukan berhubungan pada peningkatan output perekonomian saja, melainkan berkaitan pada optimalisasi mutu SDM juga, pemanfaatan tenaga kerja secara produktif, serta pencapaian kesejahteraan yang lebih luas (Ajustina et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi empiris dan teoritis melalui tiga aspek. Pertama, penelitian menerapkan data panel pada 33 provinsi Indonesia dalam kurun waktu 2019–2024 sehingga mampu menangkap variasi antarwilayah dan perubahan situasi perekonomian sebelum, saat, serta setelah masa wabah COVID-19. Kedua, penelitian menganalisis secara simultan pengaruh IPM dan TPT terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan data panel yang memungkinkan perkiraan yang lebih komprehensif dibandingkan analisis cross-section atau time series. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah dalam menggambarkan korelasi antara pembangunan manusia, tenaga kerja, dan laju perekonomian, sehingga bukan memberikan bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel saja, tapi memperkaya kajian pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai maqashid syariah, produktivitas manusia, dan kesejahteraan masyarakat (falah).

Kerangka pemikiran pada riset ini didasarkan pada asumsi bahwa IPM dan TPT merupakan aspek yang memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PE). IPM menggambarkan mutu manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup layak. Semakin tinggi IPM, semakin tinggi mutu tenaga kerja yang dipunyai suatu daerah sehingga produktivitas, inovasi, dan kemampuan menghasilkan output ekonomi akan meningkat. Dalam perspektif ekonomi

syariah, peningkatan IPM juga mencerminkan tercapainya tujuan maqashid syariah, khususnya menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Sebaliknya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan kegiatan ekonomi produktif yang belum menyerap proporsi jumlah angkatan kerja secara maksimal. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak SDM yang belum termanfaatkan secara maksimal yang membuat produksi, pendapatan masyarakat, dan konsumsi rumah tangga cenderung menurun. Dalam ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan manusia sebagai khalifah fil ardh untuk mengelola sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, TPT diperkirakan mempunyai pengaruh negatif dengan PE. IPM dan TPT secara bersama-sama diperkirakan memengaruhi pertumbuhan ekonomi karena keduanya berkaitan dengan kualitas dan pemanfaatan sumber daya manusia sebagai faktor utama pembangunan.

Penelitian dengan berlandaskan teori, penelitian lampau, dan kerangka pemikiran yang telah disusun, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- H1: IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE di Indonesia periode 2019–2024.*  
*H2: TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PE di Indonesia periode 2019–2024.*  
*H3: IPM dan TPT secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PE di Indonesia periode 2019–2024.*

## Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif, data sekunder dengan pendekatan data panel, yaitu kombinasi data *time series* dan *cross section*. Data sekunder diperoleh dari BPS yang mencakup 33 provinsi di Indonesia selama periode 2019-2024. Pemilihan data panel dilakukan karena dapat menggambarkan variasi antar daerah dengan perubahan antarwaktu sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri atas IPM dan TPT, sedangkan variabel dependen adalah PE. Analisis data dilaksanakan dengan regresi linear berganda guna mencari arah dan besar pengaruh IPM dan TPT terhadap PE di Indonesia. Pengolahan data dilaksanakan menggunakan perangkat lunak EViews.

Secara normatif, penelitian ini juga menggunakan perspektif ekonomi syariah sebagai landasan interpretatif dalam pembahasan hasil. Dalam ekonomi syariah, pembangunan ekonomi bukan hanya ditelaah sebagai peningkatan output, melainkan sebagai proses mewujudkan masalah, keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Maka IPM dipandang sebagai aspek penting karena

menggambarkan kualitas manusia dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang selaras dengan tujuan maqashid syariah. Sementara itu, TPT merepresentasikan tingkat belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, yang dalam perspektif Islam berkaitan dengan upaya menciptakan peluang kerja yang adil dan produktif bagi masyarakat. Adapun, model ekonometrik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PE = \alpha + \beta_1 IPM_{i,t} + \beta_2 TPT_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Artikel ini menggunakan *log natural* dari beberapa variable untuk menstandarkan satuan. In PE adalah pertumbuhan ekonomi; In  $\alpha$  adalah konstanta;  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  adalah parameter koefisien dari masing-masing variable independent; IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia; TPT adalah Tingkat Pengangguran Terbuka;  $\varepsilon$  adalah error term. Melalui model ini, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu mengukur pengaruh statistik IPM dan TPT terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi memberi pemahaman yang kompleks tentang pentingnya pembangunan ekonomi yang selaras pada Syariah seperti berkeadilan, kesejahteraan, dan kebaikan umat.

## Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Statistik Deskriptif

| Variabel | Mean     | Std. dev | Min.      | Maks.    | Obs. |
|----------|----------|----------|-----------|----------|------|
| IPM      | 72.21798 | 3.659355 | 60.44000  | 83.08000 | 198  |
| TPT      | 5.094697 | 1.710806 | 1.570000  | 10.95000 | 198  |
| PE       | 4.139091 | 4.208617 | -15.74000 | 22.94000 | 198  |

Sumber: Data BPS, diolah (2026)

Tabel 1, data statistik deskriptif menunjukkan bahwa IPM mempunyai rata-rata sebesar 72,21798 serta standar deviasi 3,659355, nilai minimum 60,44000, maksimum 83,08000, dan jumlah observasi 198. Angka ini menandakan bahwa tingkat IPM dalam data relatif cukup tinggi dan penyebarannya tidak terlalu besar, sehingga variasi antarwilayah atau antarperiode pengamatan cenderung moderat. Sedangkan, TPT mempunyai rata-rata 5,094697, standar deviasi 1,710806, minimum 1,570000, maksimum 10,95000, dan juga 198 observasi. Artinya, tingkat pengangguran dalam data ini berada pada kisaran yang tidak terlalu tinggi, dengan sebaran yang lebih sempit dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga perubahan TPT antar data cenderung lebih stabil. Dari sisi interpretasi, IPM menggambarkan mutu pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan standar kualitas hidup, sedangkan TPT mencerminkan kondisi penyerapan tenaga kerja biasanya semakin baik kondisi pasar kerja berarti semakin rendah TPT di suatu wilayah.

Adapun PE memiliki rata-rata 4,139091, standar deviasi 4,208617, nilai minimum -15,74000, maksimum 22,94000, dan jumlah observasi 198. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam data memiliki fluktuasi yang paling besar dibandingkan dua variabel lainnya, karena standar deviasinya paling tinggi dan rentang nilainya sangat lebar. Nilai minimum yang negatif mengindikasikan bahwa pada periode atau wilayah tertentu terjadi kontraksi ekonomi, sedangkan nilai maksimum yang cukup tinggi menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat kuat pada kondisi lain. Secara makna, PE merefleksikan perubahan output ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga data ini memperlihatkan bahwa kinerja ekonomi tidak selalu stabil dan sangat mungkin adanya pengaruh oleh beberapa faktor yang meliputi adanya investasi, konsumsi, kebijakan pemerintah, maupun kondisi eksternal. Jika dilihat secara keseluruhan, tabel ini memberi gambaran bahwa IPM relatif lebih stabil, TPT berada pada tingkat moderat dengan variasi sedang, sedangkan PE adalah variabel yang paling dinamis dan paling sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Tabel 2. Korelasi

|     | PE                   | IPM                  | TPT                 |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------|
| PE  | 1                    | -0.03209128800313578 | -0.2705878965233733 |
| IPM | -0.03209128800313578 | 1                    | 0.2774061902849013  |
| TPT | -0.2705878965233733  | 0.2774061902849013   | 1                   |

Tabel 2, hasil uji multikolinieritas menunjukkan hubungan korelasi antarvariabel yang dipakai dalam penelitian, yaitu PE, IPM dan TPT. Nilai korelasi antara IPM dan PE sebesar -0,0321, yang menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat lemah antara kedua variabel tersebut. Sementara itu, korelasi antara TPT dan PE sebesar -0,2706, yang mengindikasikan hubungan negatif dengan tingkat kekuatan yang masih rendah. Artinya, secara umum peningkatan IPM maupun TPT dalam periode penelitian tidak menunjukkan hubungan yang kuat terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, korelasi antara IPM dan TPT sebesar 0,2774 yang menunjukkan hubungan positif dengan tingkat keeratan yang rendah. Nilai korelasi ini menggambarkan bahwa perubahan pada IPM cenderung diikuti oleh perubahan pada TPT dalam arah yang sama, namun hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk menunjukkan keterkaitan yang signifikan.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian terbebas dari masalah multikolinieritas. Dalam analisis regresi, multikolinieritas umumnya dianggap bermasalah apabila nilai korelasi antarvariabel independen sangat tinggi, biasanya di atas 0,80 atau 0,90. Pada tabel terlihat bahwa korelasi antara IPM dan TPT hanya sebesar 0,2774 atau jauh dibawah. Maka variabel IPM dan TPT tidak saling menjelaskan secara berlebihan sehingga masing-masing masih dapat memberikan informasi yang berbeda dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu tidak adanya multikolinieritas, sehingga hasil estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan dengan lebih baik dan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, variabel IPM dan TPT layak digunakan secara bersamaan dalam model untuk menganalisis pengaruhnya terhadap laju perekonomian di Indonesia selama kurun waktu penelitian.

Tabel 3. Hasil Estimasi Common Effect Model (CEM)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic        | Prob.  |
|----------|-------------|------------|--------------------|--------|
| C        | 3.8255      | 5.7764     | 0.6622             | 0.5086 |
| IPM      | 0.0535      | 0.0824     | 0.6494             | 0.5168 |
| TPT      | -0.6974***  | 0.1763     | -3.9551            | 0.0001 |
| Prob-F   | 0.0004      |            | R-squared          | 0.0752 |
| F-stat   | 7.9302      |            | Adjusted R-squared | 0.0657 |
|          |             |            | DW                 | 1.2250 |

Keterangan: \*sig. 0,10 \*\* sig. 0,05 \*\*\* sig. 0,01

Sumber: Data BPS diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3 Hasil Estimasi CEM, penelitian menggunakan 198 observasi yang terdiri dari data panel 33 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2024 untuk menganalisis pengaruh IPM dan TPT terhadap PE. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki koefisien sebesar 0,0535 dengan nilai probabilitas 0,5168, sedangkan variabel TPT memiliki koefisien sebesar -0,6974 dengan nilai probabilitas 0,0001. Nilai konstanta sebesar 3,8255 memiliki probabilitas 0,5086 sehingga tidak signifikan secara statistik. Pada pengujian simultan diperoleh nilai F-statistic sebesar 7,9302 dengan Prob-F sebesar 0,0004, yang menggambarkan bahwa secara bersama-sama variabel IPM dan TPT berpengaruh signifikan terhadap PE. Sementara itu, nilai R-squared sebesar 0,0752 menggambarkan bahwa model hanya dapat mendeskripsikan sekitar 7,52% variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 92,48% terpengaruh oleh aspek lain di luar model, seperti investasi,

konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, inflasi, ekspor, dan variabel ekonomi makro lainnya.

Secara parsial, hasil perkiraan menggambarkan bahwa IPM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PE, yang berarti peningkatan kualitas manusia yang diukur melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup belum secara langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi selama periode penelitian. Kondisi ini dapat terjadi karena manfaat pembangunan manusia umumnya bersifat jangka panjang sehingga berdampak kepada PE tidak selalu terlihat secara langsung dalam periode pengamatan tertentu. Sebaliknya, TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PE, yang menunjukkan bahwa peningkatan TPT akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Koefisien sebesar -0,6974 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan TPT sebesar 1 persen berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,697 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, hasil tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia secara produktif merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah fil ardh. Pemanfaatan potensi manusia dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingginya pengangguran yang pemanfaatannya belum optimal. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja dan meningkatnya mutu SDM perlu dilakukan secara bersamaan agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

| Variable | Coefficient  | Std. Error | t-Statistic        | Prob.  |
|----------|--------------|------------|--------------------|--------|
| C        | -21.23100    | 13.82625   | -1.535557          | 0.1266 |
| IPM      | 0.511403***  | 0.184188   | 2.776524           | 0.0061 |
| TPT      | -2.269498*** | 0.306874   | -7.395546          | 0.0000 |
| Prob-F   | 0.0000       |            | R-squared          | 0.5035 |
| F-stat   | 4.8632       |            | Adjusted R-squared | 0.4000 |
| N        | 198          |            | DW                 | 1.8960 |

Keterangan: \*sig. 0,10 \*\* sig. 0,05 \*\*\* sig. 0,01

Sumber: Data BPS diolah, 2026

Berdasarkan hasil estimasi FEM pada Tabel 3, artikel ini menerapkan data panel yang terdiri dari 33 provinsi (cross-section) selama periode 2019–2024 dengan total 198 observasi. Variabel dependen yang dipakai merupakan PE, sedangkan variabel independennya adalah IPM dan TPT. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki koefisien sebesar 0,511403 dengan nilai probabilitas 0,0061 ( $< 0,05$ ), yang berarti IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan IPM sebesar 1 poin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,511 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini menggambarkan bahwa mutu SDM yang lebih baik, yang tergambar dari peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, bisa mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan itu, variabel TPT memiliki koefisien sebesar -2,269498 dengan nilai probabilitas 0,0000 ( $< 0,05$ ), yang menggambarkan bahwa TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti menunjukkan bahwa setiap kenaikan TPT senilai 1 persen akan mengurangi pertumbuhan ekonomi senilai 2,269 poin. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin rendah kemampuan perekonomian dalam menciptakan output dan nilai tambah maka semakin tinggi tingkat pengangguran karena sebagian tenaga kerja tidak terserap dalam kegiatan produktif.

Selain melihat pengaruh masing-masing variabel, kualitas model juga dapat dievaluasi melalui nilai R-squared sebesar 0,503578, yang berarti sekitar 50,36% variasi PE dapat

dideskripsikan oleh variabel IPM dan TPT beserta efek tetap masing-masing provinsi, sedangkan sisanya senilai 49,64% dipengaruhi oleh aspek lain di luar model misalnya investasi, inflasi, belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, maupun ekspor. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,400030 menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan model masih tergolong cukup baik setelah memperhitungkan jumlah variabel yang digunakan. Selanjutnya, nilai F-statistic sebesar 4,863232 dengan Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa secara simultan variabel IPM dan TPT berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, model yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian. Di sisi lain, nilai Durbin-Watson sebesar 1,895985 yang mendekati angka 2 menunjukkan bahwa model tidak menunjukkan gejala autokorelasi yang serius. Secara keseluruhan, hasil FEM menggambarkan bahwa peningkatan mutu manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam mendorong PE, sedangkan tingginya TPT menjadi hambatan utama yang dapat menekan laju perekonomian di Indonesia sepanjang kurun waktu 2019–2024.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

| Effects Test             | Statistic  | d.f.     | Prob.  |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F          | 4.395374   | (32,163) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 123.182143 | 32       | 0.0000 |

Sumber: Data BPS diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4, Uji Chow digunakan untuk menentukan model data panel yang paling tepat antara CEM dan FEM dalam menganalisa pengaruh IPM dan TPT terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Hasil uji menggambarkan nilai Cross-section F sebesar 4,395374 dengan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,0000, serta nilai Cross-section Chi-square sebesar 123,182143 dengan probabilitas 0,0000. Nilai probabilitas tersebut jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa model Common Effect lebih sesuai ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan antarprovinsi yang tidak dapat diakomodasi oleh model Common Effect sehingga diperlukan penggunaan efek individual pada masing-masing provinsi.

Hasil ini menggambarkan bahwa setiap provinsi di Indonesia mempunyai keunikan ekonomi yang selalu berbeda, baik dari segi mutu SDM, tingkat pengangguran, struktur perekonomian, maupun kapasitas pembangunan daerah yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, penggunaan FEM diplot bisa menjelaskan perbedaan karakteristik tersebut dibandingkan Common Effect Model yang menganggap seluruh provinsi memiliki perilaku yang sama. Dengan terpilihnya FEM berdasarkan Uji Chow, maka analisis selanjutnya perlu mempertimbangkan adanya efek tetap (fixed effects) pada masing-masing provinsi agar estimasi pengaruh IPM dan TPT terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih akurat dan tidak bias. Hasil ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor spesifik daerah memiliki peran penting dalam mendeskripsikan variasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode penelitian 2019–2024.

Tabel 6. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic        | Prob.  |
|----------|-------------|------------|--------------------|--------|
| C        | -5.45489    | 6.7506     | -0.8081            | 0.4200 |
| IPM      | 0.2180***   | 0.0945     | 2.3060             | 0.0222 |
| TPT      | -1.2064***  | 0.1918     | -6.2913            | 0.0000 |
| Prob-F   | 0.0000      |            | R-squared          | 0.1498 |
| F-stat   | 17.1789     |            | Adjusted R-squared | 0.1411 |
| N        | 198         |            | DW                 | 1.4509 |

Keterangan: \*sig. 0,10 \*\* sig. 0,05 \*\*\* sig. 0,01

Sumber: Data BPS diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 6 Hasil Estimasi REM, analisis dilakukan untuk uji pengaruh IPM dan TPT terhadap PE menggunakan pendekatan data panel. Hasil estimasi menggambarkan bahwa variabel IPM memiliki koefisien sebesar 0,217955 dengan nilai t-statistic sebesar 2,305957 dan probabilitas 0,0222, yang berarti IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, setiap kenaikan IPM sebesar 1 poin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,218 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini menggambarkan bahwa peningkatan mutu SDM bisa menaikkan produktivitas masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel TPT memiliki koefisien sebesar -1,206411 dengan t-statistic sebesar -6,291281 dan probabilitas 0,0000, yang menunjukkan bahwa TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan TPT sebesar 1 persen akan menurunkan PE sebesar 1,206 poin. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingginya pengangguran menyebabkan berkurangnya pemanfaatan tenaga kerja produktif sehingga berdampak pada pengurangan output ekonomi. Adapun konstanta sebesar -5,454882 tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4200, sehingga tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap model.

Dari sisi kelayakan model, nilai R-squared sebesar 0,149801 menggambarkan bahwa sekitar 14,98% variasi pertumbuhan ekonomi bisa dideskripsikan oleh variabel IPM dan TPT, sedangkan sisanya sebesar 85,02% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti investasi, inflasi, belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan faktor ekonomi makro lainnya. Meskipun nilai koefisien determinasi relatif rendah, model secara keseluruhan tetap signifikan yang ditunjukkan oleh nilai F-statistic senilai 17,17897 dengan Prob(F-statistic) sebesar 0,000000. Hal ini menggambarkan bahwa IPM dan TPT secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada bagian Effects Specification, nilai rho cross-section sebesar 0,2117 menunjukkan bahwa sekitar 21,17% variasi error berasal dari perbedaan karakteristik antarprovinsi, sedangkan rho idiosyncratic sebesar 0,7883 menunjukkan bahwa sebagian besar variasi berasal dari faktor acak dalam masing-masing observasi. Namun demikian, berdasarkan hasil Uji Hausman sebelumnya yang menghasilkan nilai probabilitas 0,0000, model REM tidak dipilih sebagai model terbaik karena terdapat hubungan antara efek individual dan variabel independen. Oleh sebab itu, meskipun REM menggambarkan bahwa IPM berpengaruh positif dan TPT berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian tetap menggunakan FEM sebagai model utama karena memberikan estimasi yang lebih konsisten dan selaras dengan karakteristik data panel yang digunakan.

Tabel 5: Hasil Uji Housman

| Test Summary         | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 41.589815         | 2            | 0.0000 |

Berdasarkan Tabel 5, Uji Hausman dilakukan guna menentukan model yang paling tepat antara FEM dan REM setelah sebelumnya Uji Chow mendeskripsikan bahwa FEM lebih baik daripada Common Effect Model. Hasil pengujian menggambarkan bahwa nilai Chi-Square Statistic sebesar 41,589815 dengan derajat kebebasan (df) sebanyak 2 dan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa REM lebih tepat digunakan ditolak. Dengan begitu, hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, yaitu FEM adalah metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini.

Secara substantif, hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara efek individual masing-masing provinsi dengan variabel independen yang digunakan, yaitu IPM dan TPT. Kondisi ini menyebabkan asumsi dasar REM tidak terpenuhi sehingga model tersebut tidak dapat memberikan estimasi yang konsisten. Oleh karena itu, FEM dipilih karena

mampu mengakomodasi karakteristik khusus setiap provinsi yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemilihan FEM juga memperkuat hasil Uji Chow sebelumnya, sehingga model akhir penelitian yang digunakan untuk menganalisa pengaruh IPM dan TPT terhadap PE Indonesia periode 2019–2024 adalah FEM. Dengan model ini, hasil estimasi yang diperoleh menjadi lebih reliabel karena telah mempertimbangkan heterogenitas antarprovinsi yang menjadi ciri khas data panel dalam penelitian ekonomi regional.

Hasil estimasi FEM, variabel IPM memiliki koefisien sebesar 0,511403 dengan nilai probabilitas 0,0061 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan kepada PE di Indonesia selama periode 2019–2024. Koefisien positif tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan IPM sebesar 1 poin akan meningkatkan laju perekonomian sebesar 0,511 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Temuan ini menggambarkan bahwa mutu SDM adalah salah satu aspek penting untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan output dan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, investasi pemerintah dalam pembangunan manusia tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu hidup sosial, tapi memberikan kontribusi yang nyata jugaterhadap peningkatan kinerja ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi FEM, variabel IPM mempunyai koefisien sebesar 0,511403 dengan nilai probabilitas 0,0061, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menggambarkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE di Indonesia periode 2019–2024. Artinya, setiap kenaikan kualitas IPM senilai satu poin akan meningkatkan PE sebesar 0,511 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini memberi dugaan bahwa peningkatan mutu SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak mampu menaikkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kapasitas produksi, serta mendorong aktivitas ekonomi yang lebih efisien. Semakin tinggi kualitas manusia yang dimiliki suatu daerah, semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak hanya menjadi tujuan pembangunan, tetapi juga menjadi faktor utama yang mendorong laju perekonomian yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori Human Capital yang dikemukakan oleh Schultz dan Becker yang menyampaikan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan adalah bentuk investasi modal manusia yang berpotensi menaikkan produktivitas dan pendapatan masyarakat (Ataitani, Yulistina, & Ramadan, 2026). Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan berbagai riset sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith yang menjelaskan bahwa mutu SDM adalah salah satu aspek utama penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Sodik & Riantani, 2025). Di Indonesia, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Jeni Palindangan (2021), Marlina (2022), Maulana (2022) dan Prameswari (2021) yang menemukan bahwa IPM mempunyai impek positif terhadap perekonomian daerah karena peningkatan mutu manusia mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Dengan demikian, hasil riset ini memperkuat argumentasi bahwa pembangunan manusia adalah instrumen penting untuk mempercepat laju perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun regional.

Dalam perspektif ekonomi syariah, hubungan positif antara IPM dan pertumbuhan ekonomi memiliki landasan yang sangat kuat. Islam memandang manusia sebagai wakil Allah di bumi (khalifah fil ardh) yang mempunyai tanggung jawab memakmurkan kehidupan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya secara optimal. Maka dari itu, peningkatan mutu manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari

upaya mewujudkan maqashid syariah, terutama untuk menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Pendidikan yang mempunyai kualitas tinggi akan menghasilkan SDM yang produktif, berintegritas, dan dapat mengembangkan aktivitas ekonomi yang halal dan bermanfaat, sedangkan tingkat kesehatan yang tinggi memiliki kemungkinan masyarakat bekerja dengan maksimal dalam menciptakan kesejahteraan (Ma'wa & Cahyadi, 2023). Konteks ini mendeskripsikan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya dipandang sebagai peningkatan output atau pendapatan saja tapi sebagai ruang untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat juga secara menyeluruh.

Lebih lanjut, ekonomi syariah menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan (falah), bukan sekadar pertumbuhan angka ekonomi (Shobri et al., 2022). Maka peningkatan IPM menjadi tolak ukur yang relevan untuk melihat suksesnya pembangunan karena mencerminkan mutu hidup masyarakat secara lebih komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Temuan tersebut sejalan dengan prinsip syariah yang menjadikan manusia sebagai pusat pembangunan (human-centered development). Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif akan berkontribusi pada peningkatan IPM sekaligus mendorong laju perekonomian yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki koefisien sebesar -2,269498 dengan nilai probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PE di Indonesia selama kurun waktu 2019–2024. Artinya, setiap peningkatan TPT sebesar 1 persen akan mengurangi nilai laju perekonomian sebesar 2,269 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi TPT, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah. Kondisi tersebut terjadi karena pengangguran mencerminkan adanya sumber daya tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga kapasitas produksi menjadi berkurang. Ketika sebagian penduduk usia kerja tidak memperoleh pekerjaan, pendapatan masyarakat menurun, daya beli melemah, konsumsi rumah tangga berkurang, dan pada akhirnya aktivitas ekonomi serta pertumbuhan ekonomi ikut mengalami perlambatan (Purwanti & Rahmawati, 2021).

Hasil penelitian ini selaras dengan teori ekonomi makro, khususnya Hukum Okun (Okun's Law) yang menjelaskan adanya hubungan negatif antara TPT dan PE (Parulian, Simbolon, Wulandari, & Budiasih, 2025). Menurut Okun (1962), peningkatan pengangguran akan menyebabkan penurunan output nasional karena sebagian tenaga kerja tidak berpartisipasi dalam proses produksi. Temuan ini juga konsisten dengan pandangan Mankiw (2021) yang menyatakan bahwa besarnya TPT menunjukkan tidak maksimalnya penggunaan faktor produksi tenaga kerja sehingga memperlambat laju perekonomian. Disamping itu, hasil riset ini mendukung berbagai penelitian empiris sebelumnya, seperti penelitian Jeni Palindangan (2021), Purwanti (2021) dan Rosyid (2025) yang menemukan bahwa TPT mempunyai pengaruh negatif terhadap PE. Dengan demikian, semakin rendah TPT, semakin besar peluang suatu daerah untuk meningkatkan output, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam pandangan syariah, hasil riset ini sangat relevan dengan dasar Islam yang mendorong setiap individu untuk bekerja dan berusaha secara produktif. Islam memandang pekerjaan sebagai wujud dari ibadah dan sarana untuk mendapatkan penghidupan yang halal (Allena, Putri, & Susanto, 2026). Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105: "Dan

katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu...”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan menolak sikap bermalas-malasan. Oleh karenanya, tingginya TPT tidak hanya menjadi masalah ekonomi, melainkan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka maqashid syariah, penciptaan lapangan kerja berkaitan erat dengan tujuan hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-nafs (menjaga jiwa), dan menjaga martabat manusia. Masyarakat yang bekerja mempunyai keahlian untuk memberikan kehidupan layak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih luas (Bahtiar & Hannase, 2021). Terlepas dari itu semua bahwa ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kesempatan ekonomi yang adil melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor riil. Berbeda dengan sistem yang berorientasi pada akumulasi modal semata, ekonomi syariah mendorong aktivitas usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas melalui pengembangan UMKM, kewirausahaan, investasi produktif, serta optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Apabila tingkat pengangguran dapat ditekan melalui kebijakan yang mendukung penciptaan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendapatan masyarakat akan meningkat, konsumsi dan investasi akan bertambah, serta pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dan inklusif. Dengan demikian, riset ini menggambarkan bahwa menurunnya TPT adalah salah satu cara strategis dalam mewujudkan falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) karena tidak serta-merta meningkatkan laju perekonomian, tapi juga menciptakan keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2024, riset ini menggambarkan bahwa pengaruh IPM dan TPT terhadap PE cenderung bervariasi pada setiap tahun pengamatan. Pada tahun 2019, IPM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE, disisi lain TPT tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, akan tetapi pada periode 2020–2024, baik IPM maupun TPT secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menunjukkan hubungan antara pembangunan manusia, kondisi ketenagakerjaan, dan PE tidak selalu bersifat langsung serta terpengaruh oleh adanya aspek eksternal, seperti misalnya adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi di masing-masing daerah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, temuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup ditelaah hanya sebagai kenaikan angka output, melainkan termasuk sebagai bagian dari upaya mewujudkan maslahah, keadilan distributif, dan kesejahteraan umat (Endah Mudiyyatul Kustinah & Fauzatul Laily Nisa, 2024). Peningkatan IPM tetap penting karena mencerminkan kualitas manusia yang lebih baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan mutu kualitas hidup layak yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah. Sementara itu, fluktuasi TPT menggambarkan masih perlunya optimalisasi penyerapan tenaga kerja agar setiap individu memperoleh kesempatan kerja yang produktif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa kecakapan model dalam mendeskripsikan variasi pertumbuhan ekonomi relatif rendah. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada sebagian besar tahun penelitian berada pada kategori rendah hingga sangat rendah, yang menggambarkan bahwa laju perekonomian provinsi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kondisi selain IPM dan TPT. Faktor-faktor seperti investasi, inflasi, belanja pemerintah, ekspor, konsumsi rumah tangga, produktivitas tenaga kerja, serta kondisi makroekonomi

lainnya diduga mempunyai andil yang lebih mendominasi dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kerangka ekonomi syariah, hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan yang berkualitas harus didukung oleh tata kelola ekonomi yang adil, produktif, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat.

Meskipun demikian, peningkatan IPM yang terjadi hampir di seluruh provinsi selama periode penelitian tetap menunjukkan pentingnya pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, fluktuasi TPT selama masa pandemi dan pemulihan ekonomi memperlihatkan bahwa pasar kerja mempunyai andil yang cukup strategis demi menjamin konsistensi perekonomian daerah. Maka dari itu upaya meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan *skill* tenaga kerja perlu diiringi dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif serta mendorong investasi daerah. Dalam perspektif ekonomi syariah, sinergi tersebut penting untuk mewujudkan PE yang bukan hanya melesat, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

### Saran

Saran bagi penelitian berikutnya adalah menambah variabel ekonomi makro lain seperti investasi, inflasi, pengeluaran pemerintah, kemiskinan, ekspor, dan konsumsi rumah tangga, serta menggunakan metode analisis data panel yang lebih komprehensif agar mampu menangkap pengaruh antarprovinsi dan antarwaktu secara lebih akurat. Penelitian berikutnya juga dapat memasukkan variabel yang lebih dekat dengan ekonomi syariah, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, atau pembiayaan syariah, agar analisis pertumbuhan ekonomi menjadi lebih relevan dengan perspektif Islam. Maka hasil penelitian diharapkan bisa menambah gambaran yang lebih kuat tentang aspek-aspek yang menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus memperkaya kajian pembangunan ekonomi yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan kesejahteraan pada perspektif ekonomi syariah.

### Referensi

- Ajustina, F., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Timur, J., Laily, F., Universitas, N., ... Veteran, ". (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637. Retrieved from <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1575>
- Allena, S., Putri, R., & Susanto, I. (2026). *Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam di indonesia tahun 2015-2024*. 8(2), 470–480. <https://doi.org/https://10.36985/3d58n429>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Arsyad, J. L. M. & A. L. L. (2019). Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi, Perspektif Ekonomi Syariah Julianti LB. Mossy & Abdul Latif L. Arsyad 1. *Journal of Islamic Economic And Business (JIEB) Pertumbuhan*, 01(02), 206–230.
- Ataitani, E. F., Yulistina, I., & Ramadan, F. K. (2026). Dinamika Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 4163–4175. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.7750>

- Bahtiar, Y., & Hannase, M. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pendekatan Maqasid Syariah Al-Ghazali. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 89–97. <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i2.304>
- Endah Mudiyaatul Kustinah, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 240–247. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1626>
- Hanifah, N., & Rachmawati, R. (2023). Analisis Faktor Konfirmasi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2020. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 304–317. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7137>
- Ihsan, D. M., Aryandhes, R. D., Parlindungan, Mahipal, & Abid, H. (2025). Peran Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 03(03), 1439–1446.
- Jeni Palindangan, & Abu Bakar. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(1), 65–80.
- Ma'wa, R., & Cahyadi, I. F. (2023). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2021 dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Kudus). *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 1(1), 97. <https://doi.org/10.21043/jebisku.v1i1.104>
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Maulana, B. F., Muhammad, F., & Deris, D. (2022). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020*. 1(1), 123–134. Retrieved from [http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8153%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/8153/5/BAB II.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8153%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/8153/5/BAB%20II.pdf)
- Melisyah. (2025). *ISSN : 3025-9495 Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*. 25(2).
- Muttaqin, R. (2011). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishoduna*, 3(2). <https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.255>
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63–71. Retrieved from <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/jmcbus/article/view/484/466>
- Nurlina, N., Ridha, A., & Asnidar, A. (2023). Determinants of Human Development Index in Indonesia Period 1990-2021. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 239–250. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7287>. Abstrak
- Parulian, F. E. D., Simbolon, R. L., Wulandari, Y. N., & Budiasih. (2025). Pembuktian Empiris Okun's Law dalam Permasalahan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle). *Ekono Insentif*, 19(1), 37–48. <https://doi.org/10.36787/jei.v19i1.1612>
- Prameswari, A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 168–179.

- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231>
- Putri, A., & Sari, N. (2024). Pembangunan Ekonomi Syariah: Peran Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 401–408. Retrieved from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/950>
- Putri, N. A. A., Anggeraini, F., & Desmawan, D. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 64–70. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.52>
- Rosyid, A., Sari, N., Sari, P. Z., Ariyani, Dharmani, I. G. A. A. N., Damayanti, E., ... Prastoeti, R. (2025). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran terhadap IPM di Indonesia Periode 2021 - 2023. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 3(2), 111–123. <https://doi.org/10.29138/jkis.v3i2.57>
- Safinatun Najah, Hayatul Millah, & Kartikawati, Y. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(3), 161–174. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2405>
- Septya Margareta, V., Puji Astuti, R., & Muamad Ali, H. (2025). Kontribusi Ekonomi Berbasis Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Modern. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 76–83.
- Shobri, H., Hasibuan, K. S., Nasution, M. D. M., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Sumatera Utara. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 264–274. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i2.12807>
- Sodik, G., & Riantani, S. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Pendapatan, Ketimpangan, dan Kemiskinan di Indonesia: Suatu Tinjauan Pustaka Economic Development oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(2), 141–160.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183–191.
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 688–699. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>